



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MUHAIMIN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 900186

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 394.000.000

1. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
2. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 309.731.017

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 789.731.017

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 789.731.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.